

PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI *GOVERNMENTALITY*: REZIM PRAKTIK UNTUK ADAPTASI DI PEKALONGAN

Danang Nurhhidayatullah¹, Sugiyanto²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rezim praktik pemerintahan Kota Pekalongan dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim. Melalui konsep *governmentality* Foucault, rezim praktik akan diidentifikasi berdasarkan rasionalitas politik, teknologi, identitas, dan lembaga yang beroperasi dalam konteks lokal. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis kebijakan adaptasi perubahan iklim, data dikumpulkan melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Kota Pekalongan secara diskursif merekonstruksi pertanggungjawaban upaya adaptasi perubahan iklim kepada individu/masyarakat terdampak untuk mengatasi risiko perubahan iklim. Melalui implementasi program kampung iklim dan pendampingan adaptasi masyarakat pesisir oleh NGO/ lembaga swasta, rezim Kota Pekalongan mengintervensi dengan mentransfer pengetahuan yang dibentuk oleh rasionalitas dan teknologi secara depolitisasi dan teknokrasi. Hal ini juga berdampak pada pelimpahan tanggungjawab baru terhadap komunitas lokal dengan nilai solidaritas dan keahlian lokal yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, rezim Kota Pekalongan alih-alih mengatur kebijakan adaptasi perubahan iklim secara komprehensif, kekuasaan dijalankan untuk memerintah dari kejauhan.

Kata kunci: governmentality, adaptasi perubahan iklim, kebijakan pemerintahan daerah

Abstract

This research explored the implementation of the Pekalongan City Government's climate change adaptation policy. Through Foucault's Governmentality, the practical regime will be determined based on political rationality, technology, identity, and institutions that work within the local context. This research utilizes a qualitative descriptive approach by studying the policy of Adaptation to climate change using interviews, observation, and documentation procedures to collect data. The results of this research show that the Pekalongan City regime reconciled the responsibility of climate change adaptation to the afflicted individual/community to mitigate the threat of climate change through discursive means. Through deploying the Climate Village Program and the Assistance of Coastal Community Adaptation by NGOs/Private Institutions, the Pekalongan City government intervenes by transferring knowledge shaped by rationality and technology into depolitical and technological domains. This also affects the delegation of new obligations to the local community, considering the importance of community solidarity and the utilization of local expertise. Therefore, power is exercised to rule from a distance under the Pekalongan City regime rather than regulating a comprehensive climate change adaptation policy.

Keywords: governmentality, Adaptation to climate change, regional government policies

A. Pendahuluan

Meningkatnya isu lingkungan di tingkat global membuktikan perubahan iklim mengalami krisis yang semakin memburuk dibawah pengaruh perilaku manusia. (Ali Sayigh, 2021; Mikhaylov et al., 2020) Beberapa penelitian mengungkapkan adanya kebutuhan untuk mempersiapkan dan beradaptasi melalui pengembangan kebijakan dan strategi terkait resiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. (Keskitalo et al., 2012) Konsep adaptasi terhadap perubahan iklim telah muncul dan mendapatkan momentum sejak tahun 1990-an. Terlepas gagasan tersebut semakin dipolitisasi, diperebutkan, dan diperdebatkan dalam pembuatan kebijakan, adaptasi perubahan iklim penting bagi masyarakat lokal dan miskin yang rentan terhadap bencana dan bahaya iklim. (Miyaguchi, 2011; Stock et al., 2021)

Indonesia telah mengambil bagian terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya mempersiapkan rencana aksi dan pendanaan menggunakan skema koordinasi multi-sektor sesuai dokumen Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Respon Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Perubahan Iklim. (Legionosuko et al., 2019) Upaya adaptasi perubahan iklim pada tingkat pemerintahan seringkali memunculkan kesenjangan yang cukup besar antara teori dan praktik. (Clar, 2019) Untuk mengeksplorasi kondisi tersebut berdampak pada pengembangan adaptasi sebagai bidang kebijakan, penelitian ini akan mengangkat kasus perubahan iklim di tingkat lokal yaitu wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

Perspektif *Governmentality* dari Michel Foucault akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana adaptasi perubahan iklim yang direncanakan dalam rezim praktik yang dibentuk oleh rasionalitas dan teknologi tertentu dari pemerintah. Secara khusus penelitian ini akan fokus pada masalah air dengan memberikan landasan pertanyaan “bagaimana” dan “tujuan” menjawab persoalan masalah terkait iklim dan lingkungan saat ini dan masa depan (banjir dan kenaikan permukaan air laut).

Governmentality dalam berbagai literatur telah banyak ditafsirkan dengan berbagai pendekatan. Secara umum, pemerintah (*Government*) didefinisikan sebagai (*Conduct of Conduct*), artinya suatu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk, membimbing atau mempengaruhi perilaku orang-orang atau beberapa orang. (Foucault, 1991) Dengan kata lain, *governmentality* adalah kepengaturan sebagai pengarahan

perilaku, yaitu upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan rangkaian cara dan dikalkulasi sedemikian rupa. (Tania Murray Li, 2007)

Governmentality merupakan pendekatan teoritis untuk memahami medan empiris dari rasionalitas, teknologi, program dan identitas rezim pemerintahan. (Mitchell Dean, 1999) Rasionalitas berfungsi sebagai politik kebenaran, menghasilkan bentuk-bentuk pengetahuan baru, menciptakan gagasan dan konsep baru yang berkontribusi terhadap pemerintah dari sektor regulasi dan intervensi baru. (Lemke, 1992) Dalam tubuh pemerintahan, rasionalitas dipahami sebagai arena kegiatan, cara, sistem berpikir tentang sifat praktik pemerintahan (siapa yang dapat memerintah, apa yang memerintah, apa atau siapa yang diperintah) yang mampu membuat suatu bentuk aktivitas tertentu dapat dipikirkan dan dipraktikkan baik untuk secara teknis dan kepada orang-orang yang mempraktikkannya. Atas dasar tersebut, *governmentality* adalah seni pemerintahan. (Foucault, 1991)

Governmentality memandang rasionalitas yang berbeda dalam suatu sistem dapat ditelusuri melalui identifikasi berbagai macam teknologi pemerintahan yang dipakai dalam sistem apapun. (Keskitalo et al., 2012) Teknologi pemerintah adalah alat analisis yang mampu mengidentifikasi rasionalitas secara spesifik sebagai strategi, teknik, program dan prosedur dimana otoritas yang berbeda mampu merealisasikannya. (OSborne & Rose, 1998) Teknologi pemerintah membutuhkan dasar analisis rasionalitas politik sebagai bentuk representasi tertentu. (Lemke, 2012) Rasionalitas politik mengarahkan keteraturan kedalam kenyataan sebagai bentuk moral, struktur epistemologis dan bahasa tertentu yang melegitimasi melalui kekuasaan (kebebasan, kesetaraan, otonomi moral, keterwakilan, dll). (Cotoi, 2015) Dengan kata lain, Teknologi pemerintahan melalui rasionalitas politik dan program pemerintah diartikulasikan sebagai pernyataan tentang kumpulan kompleks kekuatan yang beragam (hukum, arsitektur, profesional, administratif, keuangan, penilaian) yang berdampak pada keputusan dan tindakan individu, kelompok, organisasi dan populasi. Aspek tersebut dipahami dan diatur secara otoritatif melalui mekanisme sederhana oleh pihak berwenang untuk *instantiate* pemerintah seperti teknik notasi, komputerisasi dan perhitungan (sistem penilaian, standarisasi, survei, dll). (Rose & Miller, 2010) Michel Foucault mendefinisikan *Governmentality* sebagai,

“power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony.”

Governmentality adalah reformulasi Foucault tentang kekuasaan/ pengetahuan dan analisis rezim tertentu yang mencangkup bentuk-bentuk pengetahuan serta tantangan terhadap pengetahuan-pengetahuan tersebut. (Che, 2007) Kekuasaan dipandang sebagai relasi yang beragam dan menyebar seperti jaringan yang memiliki ruang lingkup strategis. Kekuasaan dalam *governmentality* adalah kekuasaan disiplin sebagai objek (individu tubuh), sedangkan subjek pemerintahan adalah populasi (tubuh sosial). (Mudhoffir, 2013)

Adaptasi perubahan iklim telah dibingkai sebagai salah satu aspek yang diperdebatkan dalam pembuatan kebijakan perubahan iklim. (Rashid, 2011; Ribot, 2014; Stock et al., 2021; Vij et al., 2018) Dalam kerangka teoritis *governmentality* Foucault, perubahan iklim sebagai wacana lingkungan dari *green governmentality* ke *ecological modernization* memunculkan transisi pemerintahan dari *biopower* menuju pemerintahan liberal maju (*advanced liberal government*). (Oels, 2005) Perubahan iklim dalam rezim *biopower* telah diproduksi oleh para ahli dengan membenarkan intervensi kebijakan pemerintah seluas-luasnya melalui kekuasaan negara dengan atas nama kelangsungan hidup umat manusia. Sedangkan pemerintahan liberal maju menjadikan perubahan iklim sebagai masalah ekonomi yang membutuhkan solusi berbasis pasar untuk memfasilitasi solusi teknologi hemat biaya. (Oels, 2005)

Identifikasi rezim praktik dalam perspektif *governmentality* dapat merumuskan aktivitas dan konteks pemerintahan yang bergantung pada bentuk-bentuk pengetahuan, teknik & praktik, rasionalitas, identitas, serta lembaga yang menjalankannya. (Mitchell Dean, 1999) Dean memperkenalkan analisis pemerintahan untuk membentuk logika intrinsik atau strategi dari sebuah rezim praktik. Kerangka analitisnya terbagi menjadi

empat aspek; bidang visibilitas yang diciptakan oleh suatu pemerintahan; teknologi dan praktik pemerintahan; bentuk-bentuk pengetahuan; dan pembentukan identitas. (Mitchell Dean, 1999; Oels, 2005)

Dalam konteks perubahan iklim, penelitian yang menggunakan perspektif *governmentality* telah banyak digunakan. Isu perubahan iklim telah melibatkan gagasan kritis pemerintahan global dan ruang publik kontemporer. (Carvalho, 2005; Methmann, 2013) Sebagai contoh pemberlakuan adaptasi sebagai isu di tingkat nasional terpadu dengan rasionalitas nasional, regional dan lokal menunjukkan keragaman dalam pengembangan teknologi adaptasi bottom-up. (Keskitalo et al., 2012) Kasus lain seperti migrasi akibat perubahan iklim telah menjadi bagian strategi rasional adaptasi dan relokasi jutaan orang dianggap diterima dan rasional. (Methmann & Oels, 2015) Selain itu kajian di Indonesia tentang REDD+ mengungkapkan inisiatif REDD+ yang melibatkan berbagai aktor menciptakan ruang politik dengan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru. (Astuti & McGregor, 2015; Boer, 2019; Setyowati, 2020)

Penelitian ini akan fokus mengkaji sejauh mana kebijakan adaptasi perubahan iklim pemerintahan Kota Pekalongan terimplementasikan. Kerangka analitis *governmentality* akan digunakan untuk menjawab bagaimana rezim praktik Kota Pekalongan memformulasikan pengetahuan dan kekuasaan, rasionalitas, dan teknologi pemerintah dalam membentuk kebijakan adaptasi perubahan iklim. Lalu sejauh mana karakteristik tersebut mewujudkan tujuan yang disasar dan melalui mekanisme apa tindakan adaptasi ditingkat lokal mampu direalisasikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan area studi kasus di Kota Pekalongan. Data dikumpulkan melalui Teknik observasi, interview dan dokumentasi. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* agar sampel sumber data dipilih sesuai pertimbangan dan tujuan penelitian. Merujuk pola Miles dan Huberman analisis data pada penelitian ini melalui tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan teknik triangulasi sumber untuk memvalidasi data. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengecek dan membandingkan data secara

konsisten dan sejauh mana temuan lapangan sesuai dengan kebutuhan eksplorasi data dalam kajian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kota Pekalongan merupakan salah satu wilayah di pulau Jawa yang mengalami dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir. Dampak yang ditimbulkan yaitu banjir dan rob, penurunan permukaan tanah (*Land Subsidence*), dan ketersediaan air. Berdasarkan data DPUPR Kota Pekalongan, presentase genangan banjir dan rob Kota Pekalongan seperti tabel dibawah ini:

| Tahun | Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha) | Luas Genangan (Ha) | Persentase |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|
| 2016 | 4.525 | 1.870 | 41,33 |
| 2017 | 4.525 | 1.396 | 30,85 |
| 2018 | 4.525 | 1.091 | 30,75 |
| 2019 | 4.525 | 1.057 | 23,35 |
| 2020 | 4.525 | 1.730 | 38,23 |

Sumber: Data Primer, 2022

Luasnya genangan banjir dan rob mengakibatkan kurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan, sehingga air aliran permukaan hujan (*run off*) yang semakin membesar, dan pendangkalan sungai di wilayah hilir. Sedangkan penurunan muka tanah (*Land Subsidence*) di Kota Pekalongan dapat dilihat dibawah ini:

| Letak Patok | Pemasangan | Penurunan |
|---|-------------------|------------------|
| Kantor Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat | 12 Okt 2021 | 1,7 cm |
| Kantor Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara | 14 Okt 2021 | 1,18 cm |
| TPA Slamaran Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara | 17 Okt 2021 | 1,6 cm |
| Kantor Kel. Setono Kec. | 23 Nov 2021 | 1,1 cm |

| | | |
|--|---------------|---------|
| Pekalongan timur | | |
| Stadion Hoegeng Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Utara | 14 Maret 2020 | 11,9 cm |
| Kantor Kec. Pekalongan Selatan | 02 Feb 2020 | 2 cm |

Sumber : Data Primer, 2022

Tingginya penurunan muka tanah salah satunya disebabkan oleh tingginya penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat Kota Pekalongan. Disamping itu, ketersediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga di Kota Pekalongan semakin susah didapat. Pemerintah Kota Pekalongan telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang untuk menyediakan ketersediaan air baku dengan mekanisme PDAM dan Pamsimas.

Dampak perubahan iklim menjadi ancaman yang serius bagi pemerintahan Kota Pekalongan. Isu perubahan iklim telah direspon oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui integrasi pembangunan daerah berkelanjutan (SDGs). Fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintah Kota Pekalongan yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.

Namun dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2022 capaian SDG`s pilar pembangunan lingkungan di Kota Pekalongan tahun 2020 pada aspek adaptasi perubahan iklim, pemerintah Kota Pekalongan gagal mencapai pembuatan dokumen strategi pengurangan bencana dan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 dalam aspek adaptasi perubahan iklim menargetkan implementasi jumlah kampung iklim yang terbentuk sejumlah 4 lokasi dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Disamping itu Kota Pekalongan belum memiliki

dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) yang terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah.

Walaupun demikian, pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan beberapa program adaptasi perubahan iklim, meliputi

a. Pembentukan Kampung Iklim (*Climate Village*)

Kampung iklim adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP). Sesuai dengan Permen LHK No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim dan diperbaharui menjadi Permen LHK No. P.84/MenLHK/Setjen/ Kum.1/11/ 2016, program kampung iklim menjadi agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan upaya penguatan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah membentuk 8 lokasi yang melaksanakan program kampung iklim, yaitu sebagai berikut

| No. | Lokasi | Pendaftaran SRN (Sistem Registrasi Nasional) | |
|-----|---|--|-----------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | RW IX Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur | Daftar tapi belum selesai prosesnya | Tidak terdaftar |
| 2. | RW I Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur | Daftar (sertifikat peserta kat. Madya) | Proses daftar |
| 3. | RW X Kelurahan Medono, Kec. Pekalongan Barat | Daftar (sertifikat peserta kat. Madya) | Proses daftar |
| 4. | RW X Kelurahan Pekalongan Selatan, | Terdaftar | Terdaftar |
| 5. | RW XI Pekalongan Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara | Terdaftar | Terdaftar |
| 6. | RW XV Kelurahan Setono, Kec. Pekalongan Timur | | Proses daftar |

| | | | |
|----|---|---|---------------|
| 7. | RW XII Kelurahan Medono, Kec. Pekalongan Barat | Daftar (sertifikat peserta kat. Madya) | Proses daftar |
| 8. | RW III Kelurahan Tirto, Kec. Pekalongan Barat | | Proses daftar |

Program kampung iklim Kota Pekalongan memiliki 5 sektor kegiatan utama yaitu (1) Pengendalian banjir, meliputi Penampungan air hujan, Biopori, Sumur Resapan, Meninggikan Struktur Bangunan, Saluran air. (2) Budidaya Tanaman Pangan (KPPL) (3) Penerapan Urban Farming. (4) Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat. (5) penghijauan.

b. Pendampingan Adaptasi Masyarakat Pesisir

Kota Pekalongan telah mendapatkan pendampingan masyarakat oleh berbagai NGO/ lembaga lokal terkait upaya peningkatan adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu lembaga yang melakukan pendampingan adaptasi masyarakat pesisir yaitu Mercy Corps Indonesia dan Kemitraan. Mercy Corps Indonesia sebagai afiliasi dari organisasi Mercy Corps Global telah bekerjasama dengan pemkot Pekalongan dengan melakukan program analisis kajian tentang kerentanan dan risiko akibat ancaman limpasan rob, kondisi kerentanan wilayah, serta menganalisis risiko yang terbangun dari potensi ancaman dan kondisi kerentanan tersebut. Tahun 2021 Mercy Corps Indonesia juga telah melakukan program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Adaptasi Perubahan Iklim di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Bandengan, Degayu dan Krapyak. Program ini dilakukan dengan pendekatan workshop perencanaan tata guna lahan secara partisipatif (*Participatory Landuse Planning/ PLUP*) yang melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan kelurahan/ wilayahnya.

Kedua, Kemitraan. Organisasi independen ini membantu pemkot Pekalongan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berketahanan iklim dan pendampingan masyarakat pesisir Kota Pekalongan. Adapun program pendampingan adaptasi masyarakat yang dijalankan oleh Kemitraan meliputi,

| No. | Program | Pelaksanaan | Target dan Capaian | Keterlibatan |
|-----|---|---|--|---|
| 1. | Pemutaran Film Semesta dan Ada Juang di Tanah Tergenang | Dilaksanakan pada tanggal 6 & 8 Desember 2021 di studio XXI Transmart Kota Pekalongan dan Akhir Desember 2021 sampai Februari 2022 di beberapa sekolah SMA/ SMK, dan SLB Negeri Kota Pekalongan | Membangun kesadaran dampak perubahan iklim dan krisis iklim | Pemkot Pekalongan, Komunitas Lokal, pelajar SMA/ SMK, Mahasiswa, Komunitas Muda, Karang Taruna, Guru/ Pengajar, dan Masyarakat Umum Pekalongan. |
| 2. | Pembentukan Fasilitator Kelurahan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kelurahan | Dilaksanakan pada tanggal 16-22 Desember 2021 di Perdikan (Perhimpunan Pendidik bagi Keadilan) INSISTPress Yogyakarta | Mampu mengorganisasikan masyarakat lokal sesuai karakteristik wilayah, menciptakan perencanaan yang tepat, | Fasilitator Kelurahan/ Community Organizer (CO) 8 Kelurahan. Pengajar Roem Topatimasang, Ahmad Mahmudi, dan Toto Rahardjo. |
| 3. | Penanaman Mangrove | Dilaksanakan pada 22-24 Juli 2022 di Kelurahan Degayu Kota Pekalongan. Pada tanggal | Penanaman 2500 bibit mangrove spesies <i>Rhizophora mucronata</i> . Penanaman 1600 | Pemerintahan Kota Pekalongan, LSM, Komunitas Lokal, Masyarakat |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | 21 September 2022 di Kawasan Informasi Mangrove (PIM) Kota, Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan | bibit mangrove jenis Cemara laut dan Brayo | Lokal |
| 4. | Kompetisi Aksi Generasi Muda Perubahan Iklim Kota Pekalongan | Dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2022, lomba diadakan dalam bentuk karya video pendek, desain poster, pidato, dan foto. Kunjungan ke daerah terdampak banjir rob Pekalongan | Memaksimalkan kampanye tentang isu perubahan iklim khususnya di Kota Pekalongan dan kampanye sampah. Memberikan gambaran secara praktis terkait dampak perubahan iklim di daerah terdampak banjir rob Kota Pekalongan. | Sejumlah 665 peserta dari kalangan anak muda. Kunjungan daerah terdampak rob dari 100 finalis terpilih. Pemkot Pekalongan, Ketua DPRD Kota Pekalongan dan perwakilan OPD. |
| 5. | Kolaborasi Bareng Pemuda Pekalongan (KOBAR Pekalongan) | Dilaksanakan pada 3-6 Juli 2022 di Grand Valley, Bandungan, Kab. Semarang, Jawa Tengah. | Peserta diarahkan untuk membuat kampanye sosial via foto, video, dan public speaking. Memainkan peran generasi muda Pekalongan untuk menjadi penggerak masyarakat dalam upaya penyadaran | Peserta berusia 16-25 tahun dari peserta yang masuk 100 besar Kompetensi Aksi Generasi Muda Adaptasi Perubahan Iklim Kota |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | | publik terkait perubahan iklim. Merencanakan aksi dan kolaborasi terkait perubahan iklim | Pekalongan. Kepala DLH Provinsi Jawa Tengah, Direktur Eksekutif Kemitraan, Wakil Walikota Pekalongan. |
| 6. | Workshop Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular | Dilaksanakan pada 13 Juli 2022 di Ballroom Hotel Dafam Kota Pekalongan | Menciptakan program pemanfaatan sampah bernama Pemberdayaan Omah Olah Pilah Sampaj Mandiri dan Berekonomi (DAYA OOPS MAMI). Menargetkan 216 titik pengelolaan sampah melalui DAYA OOPS MAMI dan TPS3R agar tidak berakhir di TPS. | Pemkot Pekalongan, Kepala DLH Kota Pekalongan, Kepala Bappeda, perwakilan 8 kelurahan, Paguyupan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Resuse Reycke (TPS3R), Komunitas Lokal, BEM seluruh kampus di Pekalongan, Kasubdit Ekonomi Sirkuler Direktorat Pengurangan Sampah KLHK, DLH Provinsi Jawa Tengah. |

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan kebijakan dan upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan tersebut, program/ kegiatan kolaboratif dengan pihak luar dan masyarakat terdampak merekonstruksi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai tanggungjawab bersama. Disinilah rasionalitas pemerintahan Kota Pekalongan tergambar, alih-alih mendorong upaya adaptasi perubahan iklim sebagai tanggungjawab dan kewenangan

pemerintahan daerah, rasionalitas lebih digambarkan pada upaya tanggungjawab bersama.

Atas dasar tersebut, rasionalitas yang dijalankan oleh rezim pemerintahan Kota Pekalongan dapat diidentifikasi melalui seperangkat strategi, teknik, program dan prosedur, dimana otoritas birokrasi pemerintah mampu merealisasikannya. Program kampung iklim menjadi salah satu upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Pekalongan untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana dampak perubahan iklim dan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat terdampak dalam isu adaptasi perubahan iklim. Sebagai program Kementerian LHK di tingkat RW atau kelurahan, Proklam membentuk aktivitas masyarakat terdampak agar sadar terhadap isu perubahan iklim dan membangun ketahanan iklim dengan melakukan kegiatan yang melestarikan lingkungan seperti penanaman mangrove, budidaya pertanian perkotaan, pengolahan sampah dll.

Dua hal yang telah dideskripsikan diatas, pemerintahan Kota Pekalongan mengoperasikan konsep ketahanan iklim melalui seperangkat program untuk mentransfer konsep tertentu tentang ketahanan iklim dan tata kelola adaptasi perubahan iklim ditingkat masyarakat lokal. Konsep tersebut semakin disosialisasikan ke masyarakat dan mereproduksi rasionalitas adaptasi perubahan iklim dalam bentuk depotilisasi dan teknokratis. Apabila masyarakat berhasil melaksanakan program dengan rasionalitas yang dibentuk oleh pemerintahan dan menghasilkan pengetahuan sesuai yang diharapkan, program semacam itu akan terus dijalankan dengan alokasi pendanaan yang semakin meningkat. Walaupun demikian, kapasitas masyarakat yang terdampak untuk mampu beradaptasi dengan perubahan iklim sama pentingnya dengan kemampuan mereka terhadap kerentanan perubahan iklim dengan bantuan pemerintahan Kota Pekalongan.

Aspek rasionalitas dan teknik/ bentuk pengetahuan yang telah dijalankan disisi lain akan melahirkan identitas rezim pemerintahan Kota Pekalongan terhadap regulasi adaptasi perubahan iklim. Identitas yang dimunculkan telah diartikulasikan dengan kuat melalui pendekatan penguatan peran antar OPD se Kota Pekalongan dan berkolaborasi dengan NGO dalam pengelolaan adaptasi perubahan iklim. Pemerintahan Kota Pekalongan membangun komunikasi dan pengetahuan terkait upaya adaptasi perubahan iklim terutama dengan melibatkan NGO dan komunitas lokal yang peduli terhadap ancaman perubahan iklim.

Tanggungjawab bersama ini menciptakan citra positif terhadap pemerintahan Kota Pekalongan sebagai aktor yang menggambarkan pemerintahan pusat dengan rasionalitas yang diatur secara menyeluruh terkait bagaimana adaptasi perubahan iklim harus dilakukan. Oleh sebab itu, teknik reproduksi pengetahuan teknokratis tersebut tidak hanya menyimpulkan efek kekuatan peran NGO dan komunitas lokal tetapi pemerintahan Kota Pekalongan itu sendiri.

Pemerintahan Kota Pekalongan secara jelas bergerak dalam rasionalitas dominan dari pemerintahan pusat dalam menjalankan program maupun kerjasama dengan NGO dan komunitas lokal. Disisi lain menggunakan pengetahuan yang berdasarkan rasionalitas mereka untuk menjalankan serangkaian strategi dan program melalui komunikasi antar lembaga pemerintahan, NGO dan komunitas lokal sebagai nilai tambah.

D. Kesimpulan

Implementasi kerangka kerja pemerintahan multi-level dalam bidang kebijakan adaptasi perubahan iklim terhadap rezim perubahan iklim global telah mereproduksi pengetahuan, rasionalitas dan teknologi yang mengatur, melalui mekanisme solusi berbasis pasar/ analisis biaya manfaat dalam bentuk inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengkaji pengembangan adaptasi perubahan iklim ditingkat pemerintahan daerah Kota Pekalongan, studi ini menunjukkan bahwa rezim perubahan iklim global telah mengindividualisasikan dan mendesentralisasi ketahanan iklim kedalam tubuh masyarakat paling terdampak perubahan iklim.

Hasil penelitian ini mengungkapkan upaya adaptasi perubahan iklim oleh pemerintahan Kota Pekalongan secara konstruksi diskursif melimpahkan pertanggungjawaban kepada individu atau masyarakat terdampak untuk mengatasi risiko perubahan iklim. Ini dibuktikan dengan program Kampung Iklim sebagai ruang intervensi pemerintahan daerah untuk mendistribusikan pengetahuan adaptasi perubahan iklim yang dibentuk oleh rasionalitas dan teknologi secara depotilisasi dan teknokratis.

Lebih jauh lagi, alih-alih individu atau masyarakat bertanggungjawab dalam upaya adaptasi perubahan iklim, komunitas lokal menjadi unit tanggungjawab baru dengan nilai solidaritas yang masif dan keahlian lokal yang dimanfaatkan. Hadirnya kerjasama pemerintahan Kota Pekalongan dengan berbagai Lembaga/ NGO nasional dan transnasional seperti Kemitraan, alih-alih mengatur regulasi adaptasi perubahan iklim lebih sedikit, pemerintahan Kota Pekalongan berusaha untuk memerintah dari kejauhan. Kajian ini menurut peneliti perlu ditindak lanjuti pada aspek upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Isu perubahan iklim di Indonesia melalui pendekatan governmentality juga belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, peneliti mendorong studi lanjutan untuk menganalisis kebijakan perubahan iklim di Indonesia, sejauh mana pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan dampak perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Ali Sayigh. (2021). Up-Date: Renewable energy and climate change. 6 (*Renew. Energy Environ. Sustain Clean Energy and Low Waste*), 14.
- Astuti, R., & McGregor, A. (2015). Responding to the green economy: how REDD+ and the One Map Initiative are transforming forest governance in Indonesia. *Third World Quarterly*, 36(12), 2273–2293.
- Boer, H. J. (2019). Deliberative engagement and REDD+ in Indonesia. *Geoforum*, 104(April), 170–180.
- Carvalho, A. (2005). Governmentality of Climate Change and The Public Sphere.
- Che, E. (2007). ANALYTICS OF GOVERNMENT, THEORIES OF STATE Governmentality and the Foucauldian Challenge to International Political Economy.
- Clar, C. (2019). Coordinating climate change adaptation across levels of government: the gap between theory and practice of integrated adaptation strategy processes. *Journal of Environmental Planning and Management*, 62(12), 2166–2185.
- Cotoi, C. (2015). Neoliberalism: A Foucauldian Perspective. *International Review of Social Research*, 1(2), 109–124.
- Flood Resilience Alliance. (2020). Kompilasi Laporan Singkat Analisa Bahaya, Kerentanan dan Risiko DAS Kupang, Pekalongan.
- Foucault, M. (1991). The Foucault Effect. In P. M. Graham Burchell, Colin Gordon (Ed.), *Library of Congress cataloging-in-Publication Data. The University of Chicago Press*.
- Keskitalo, E. C. H., Juhola, S., & Westerhoff, L. (2012). Climate change as governmentality: Technologies of government for adaptation in three European countries. *Journal of Environmental Planning and Management*, 55(4), 435–452.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295.

- Lemke, T. (1992). *Foucault, Governmentality, dan Kritik*. 2, 21–24.
- Lemke, T. (2012). *Ekonomi dan Masyarakat biopolitik ’: Michel kuliah Foucault di Collge de*.
- Methmann, C. (2013). The sky is the limit:1 Global warming as global governmentality. *European Journal of International Relations*, 19(1), 69–91.
- Methmann, C., & Oels, A. (2015). From ‘fearing’ to ‘empowering’ climate refugees: Governing climate-induced migration in the name of resilience. *Security Dialogue*, 46(1), 51–68.
- Mikhaylov, A., Moiseev, N., Aleshin, K., & Burkhardt, T. (2020). Global climate change and greenhouse effect. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2897–2913.
- Mitchell Dean. (1999). *Governmentality : Power and Rule in Modern Society* (2 ed.). SAGE.
- Miyaguchi, T. (2011). Community-based adaptation to climate change: the concept, challenges and way forward. *SANSAL: An Environmental Journal for the Global community*, 5, 21–35. <http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/143610>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1).
- Oels, A. (2005). Rendering climate change governable: From biopower to advanced liberal government? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 7(3), 185–207.
- OSborne, T., & Rose, N. (1998). Introduction. In *Economy and Society* (Vol. 27).
- Rashid, H. (2011). Media framing of public discourse on climate change and sea-level rise: Social amplification of global warming versus climate justice for global warming impacts. In M. Hossain & E. Selvanthan (Eds.), *Climate change and growth in Asia*. Edward Elgar.
- Ribot, J. (2014). Cause and response: vulnerability and climate in the Anthropocene.

Journal of Peasant Studies, 41(5), 667–705.

Rose, N., & Miller, P. (2010). Political power beyond the State: Problematics of government. *British Journal of Sociology*, 61(SUPPL. 1), 271–303.

Setyowati, A. B. (2020). Governing the ungovernable: Contesting and reworking REDD+ in Indonesia. *Journal of Political Ecology*, 27(1), 456–475.

Stock, R., Vij, S., & Ishtiaque, A. (2021). Powering and puzzling: climate change adaptation policies in Bangladesh and India. *Environment, Development and Sustainability*, 23(2), 2314–2336.

Tania Murray Li. (2007). *The Will To Improve: Governmentality, Development, and The practice of Politics*. In *Duke University Press*.

Usman, M., Husnain, M., Riaz, A., Riaz, A., & Ali, Y. (2021). Climate change during the COVID-19 outbreak: scoping future perspectives. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(35), 49302–49313.

Vij, S., Biesbroek, R., Groot, A., & Termeer, K. (2018). Changing climate policy paradigms in Bangladesh and Nepal. *Environmental Science and Policy*, 81(January), 77–85.